



STABILITAS KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA DI TENGAH PANDEMI COVID 19

ABSTRACT

This paper examine the impact of the Covid 19 pandemic on regional economic growth and the condition of the financial system in the Sumatera region from Q1 2008 - Q2 2020 in ten provinces in the Sumatera. By using multiple linear regressions, this study identifies financial system factors and macroeconomic indicators that affect regional economic growth and includes Covid 19 as an economic shock. This paper also identifies the level of elasticity of regional macroeconomic and financial indicators in influencing economic growth. The results of this study found that each region in the Sumatra region has high connectivity and has trading partners with adjacent areas, another finding is that banking finance affects the level of regional economic growth and the emergence of the Covid 19 pandemic has a significant effect on the regional economy in the short term. The problem of the Covid 19 pandemic is not only a health problem but has also affected all economic, social and cultural aspects of society. Covid 19 is not only the responsibility of the central government but also local governments, accommodated by financial institutions in maintaining regional financial and economic system stability.

Keywords: Covid 19; Financial stability; Regional economy; Sumatran economy

I. PENDAHULUAN

1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Sistem Keuangan Indonesia Menghadapi Gejolak Ekonomi

Awal Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal kedua di tahun 2020 yang mencapai angka 5,32%. Angka tersebut berada di bawah perkiraan pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam rentan 4,3%-4,8%. Meski PDB mengalami kontraksi namun sampai saat ini Indonesia belum dianggap masuk pada zona resesi ekonomi. Dikatakan resesi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara dilaporkan mengalami penurunan sebanyak dua periode (kuartal) secara berturut-turut. Selain itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa hingga kuartal kedua 2020, kondisi eksternal ekonomi Indonesia dinilai cukup baik dengan ditandai defisit transaksi berjalan pada triwulan I tahun 2020 mengalami penurunan 1,4 persen dan cadangan devisa dinilai masih besar.

Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia masih stabil ditengah pandemi Covid 19, nilai tukar rupiah meski sempat terpuruk namun kembali menguat pada kuartal kedua tahun 2020 seiring pasar keuangan global yang mulai stabil. Dari sektor keuangan, likuiditas perbankan dinilai cukup memadai sehingga sistem keuangan tetap terjaga stabil. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bersama dengan sejumlah lembaga keuangan terkait berupaya memperkuat instrumen moneter dan fiskal guna menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan serta memitigasi dampak resesi yang berkepanjangan.

Kondisi pelemahan ekonomi Indonesia akibat Pandemi Covid 19 tidak hanya kali ini dihadapi Indonesia. Kondisi krisis ekonomi dapat disebabkan karena adanya dampak yang ditimbulkan dari ekonomi global, dinamika politik dan implementasi kebijakan internasional. Instabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara mengakibatkan sistem keuangan dan ekonomi menjadi lebih rapuh saat diperhadapkan dengan gejolak ekonomi. Sejarah panjang instabilitas ekonomi telah memberi pukulan keras bagi upaya pembangunan ekonomi dan pemulihan kondisi keuangan ekonomi domestik.

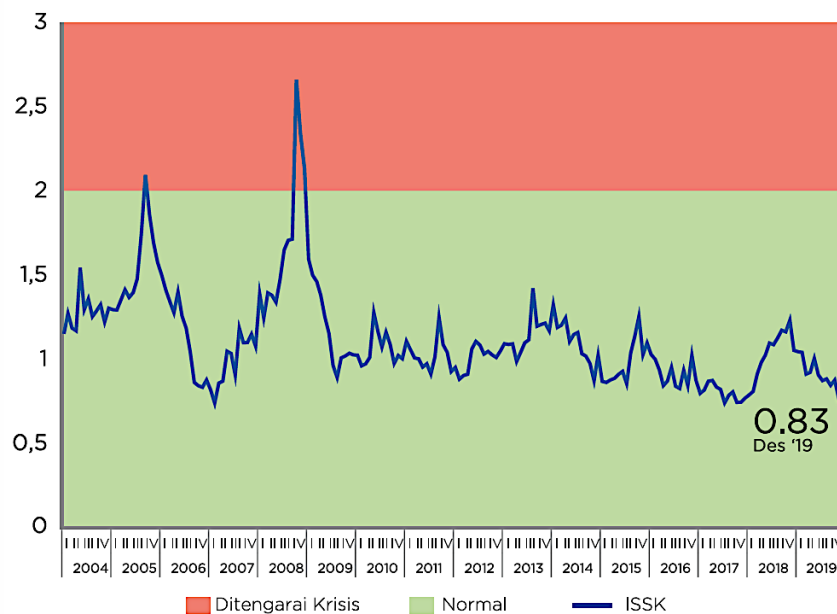
Setelah Indonesia berhasil keluar menjadi negara merdeka di tahun 1945, persoalan krisis ekonomi dihadapi Indonesia tahun 1960 akibat gejolak politik, tak berhenti sampai disitu, krisis ekonomi Indonesia juga turut terjadi di tahun 1997 dan terus bergulir. Struktur perekonomian mengalami gejolak ditandai dengan laju inflasi, nilai tukar yang berfluktuasi hingga di tahun 2001 nilai tukar rupiah mampu menembus dari target pemerintah yakni Rp.7.000, namun realisasi nilai tukar di tahun tersebut mencapai angka Rp.11.000. Kondisi ini terus bergulir dan memberikan dampak yang signifikan tidak hanya perlambatan perekonomian dan instabilitas sistem keuangan di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan bahwa di tahun 2005 kondisi sistem keuangan Indonesia masuk dalam area krisis meski kondisi ini tidak berlangsung lama. Perjuangan panjang negara dalam melakukan pembenahan ekonomi dan keuangan kembali teruji saat tahun 2008 terjadi krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Meski krisis ini tidak terjadi di Indonesia, namun krisis yang ada di negara adidaya tersebut memberikan imbas terhadap perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Amerika Serikat yang saat itu menjadi negara adikuasa sekaligus pengendali ekonomi global mengalami kegagalan dalam pengelolaan sektor properti. Efek kredit macet dalam sektor properti tersebut mengakibatkan efek sistemik atau efek domino yang mengakibatkan pelemahan lembaga keuangan global. Sejumlah harga saham yang dimiliki oleh perusahaan internasional mengalami kontraksi sehingga mengakibatkan pada nilai aset perusahaan turun drastis.

Indonesia yang saat itu memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat tentu terdampak akibat krisis tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya jalur pasar uang dan pasar barang dengan ditandai dengan pembatalan mitra kerja sama ekspor

serta pembayaran barang ekspor yang terhambat. Peristiwa ini semakin diperparah karena munculnya permasalahan likuiditas perbankan di Indonesia yang juga berdampak sistemik. Tahun 2018 menjadi pukulan keras bagi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia (ISSK) pun masuk dalam zona merah dengan angka yang mengkhawatirkan dengan angka ISSK sebesar 3,05 sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV tahun 2008 mengalami penurunan sebesar minus 3,6 persen(qtq).

Perekonomian daerah pun turut terdampak krisis keuangan global tersebut, hal ini ditandai dengan pelemahan ekonomi dan keuangan dari sektor perdagangan, usaha masyarakat yakni UMKM serta lapangan kerja. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang memiliki angka perdagangan transaksi luar negeri yang cukup besar mengalami perlambatan nilai ekspor sampai akhir tahun 2008. Sedangkan bagi UMKM yang merupakan unit usaha masyarakat, investasi serta pembiayaan atau kredit dari perbankan menjadi penopang usaha yang sangat mempengaruhi bisnis usaha.

Gambar 1.1 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia



Sumber : Bank Indonesia

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah guna melakukan pemulihan ekonomi dan keuangan untuk keluar dari krisis keuangan global. Kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia kembali menunjukkan kinerja yang baik ditengah gejolak ekonomi global dan domestik meski dalam kondisi yang berfluktuasi.

Kuartal pertama tahun 2020, kondisi ekonomi Indonesia kembali terpukul akibat Pandemi Covid 19. *Corona Virus Disease* (Covid) 19 merupakan virus yang bermula dari Wuhan, China muncul di akhir 2019. Penyebaran virus tersebut sangat cepat dan hampir merambah ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid 19 sebagai pandemi global pada Maret 2020, sejumlah negara mengambil langkah taktis untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah cara untuk meminimalisir angka kasus positif Covid 19, dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), *social / physical distancing, work and school from home*. Kebijakan ini berimplikasi pada pelemahan kinerja keuangan Indonesia, perdagangan internasional Indonesia serta pertumbuhan ekonomi domestik. Di tengah pembatasan sosial masyarakat pada Triwulan I tahun 2020, ekonomi domestik merangkak tumbuh di angka 2,97 persen, angka ini melambat dibandingkan triwulan 4 tahun 2019 sebesar 4,97 persen (yoy) dengan perlambatan pada sektor jasa dan perdagangan seperti perhotelan, restoran, transportasi dan investasi.

Tabel 1.1 Resesi Ekonomi Beberapa Negara akibat Pandemi Covid 19

No	Negara	GDP Growth (% YoY)		GDP Growth (%QoQ)	
		Q1 2020 (Jan-Mar)	Q2 2020 (Apr-June)	Q1 2020	Q2 2020
1	Indonesia	2.97	-5.32	-2.41	-4.19
2	Thailand	-2.0	-12.2	-9.7	-2.5
3	Malaysia	0.7	-17.1	-2.0	-16.5
4	USA	0.3	-9.5	-5.0	-32.9
5	China	-6.8	3.2	-10.0	11.5
6	Hongkong	-9.1	-9.0	-5.5	-0.1
7	Singapore	-0.3	-12.6	-3.3	-41.2
8	Filipina	-0.7	-16.5	-5.7	-15.2

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (September 2020)

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid 19 tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, China sebagai negara episentrum penyebaran pertama virus Covid 19 mengalami resesi ekonomi dimulai akhir tahun 2019 lalu dan perlahan meningkat di triwulan kedua tahun 2020. Dibanding dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia cukup menunjukkan kinerja yang baik dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini. Kondisi ini tidak terlepas

dari upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam pemulihan ekonomi serta sejarah panjang pengawasan stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia.

Kondisi instabilitas keuangan Indonesia bukan hanya dialami di tahun 2020 saja, namun di beberapa tahun sebelumnya gejala keuangan pun telah memukul kondisi keuangan Indonesia. Sebagai efek sistem yang ditimbulkan oleh dinamika makroekonomi global, sistem keuangan Indonesia akan terpengaruh. Di tahun 2019 lalu, perang dagang terjadi antara AS dan Tiongkok serta peningkatan geopolitik membawa pengaruh yang signifikan pada sektor perdagangan dan keuangan global.

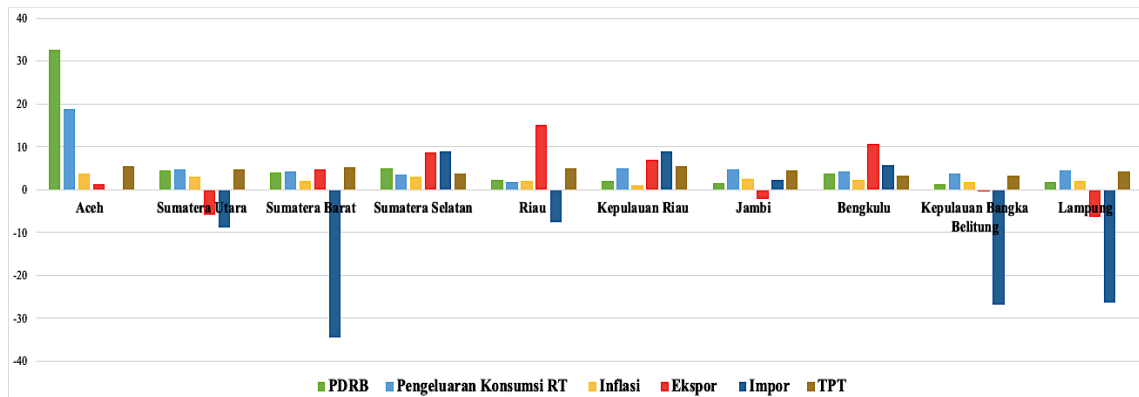
Ketepatan penanganan serta implementasi kebijakan yang efektif dalam menangani masalah Covid 19 menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi risiko sistemik Covid 19 terhadap perekonomian serta sistem keuangan dan juga seluruh komponen makroekonomi negara. Covid 19 bukan hanya menjadi permasalahan kesehatan namun juga menjadi persoalan yang mempengaruhi segala aspek perekonomian Indonesia.

Sistem keuangan terdiri dari sektor keuangan yang didalamnya merupakan komponen keuangan yakni lembaga, pasar infrastruktur dan pelaku sektor keuangan yang bersama-sama memiliki keterkaitan dan berinteraksi dalam pembiayaan dan pertumbuhan perekonomian. Sistem keuangan dikatakan stabil jika kondisi sistem keuangan secara nasional berfungsi secara efektif, efisien serta memiliki ketahanan terhadap guncangan ekonomi baik yang berasal dari nasional dan global sehingga menciptakan alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan yang dapat memiliki kontribusi terhadap kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2 Kondisi Perekonomian dan Sistem Keuangan Wilayah Sumatera

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal September 2020, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di 32 provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif dan sebanyak dua provinsi yakni Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami pertumbuhan positif di triwulan kedua tahun 2020. Sebanyak 9 provinsi yang merupakan provinsi penyumbang 65,5 persen pertumbuhan Indonesia pada triwulan kedua berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan dampak pada kontraksi ekonomi nasional.

Gambar 1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera Tw 1 2020 (%)



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Sepuluh provinsi di Sumatera juga turut menyumbang besarnya kontraksi ekonomi nasional di triwulan kedua tahun 2020 namun berdasarkan laporan Bank Indonesia, kondisi stabilitas sistem keuangan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera mengalami kondisi yang stabil, cenderung membaik terpantau mengalami peningkatan sektor keuangan dan perbankan.

Tabel 1.2 Kondisi Sistem Keuangan dan Perbankan 10 Provinsi di Pulau Sumatera (Q1 2020)

Provinsi	Kredit UMKM dan MKM (Miliar Rp)	DPK (%)	Pengeluaran Konsumsi RT (%)	LDR (%)	Kredit RT (Miliar Rp)	NPL (Miliar Rp)
Aceh	7,729 ↓	1,45 ↓	18,85 ↑	96,42 ↑	37,620 ↓	542 ↑
Sumatera Utara	56,171 ↓	7,01 ↑	4,73 ↑	94,65 ↓	226,751 ↑	7,764 ↑
Sumatera Barat	18,587 ↑	3,09 ↓	4,28 ↓	138,12 ↑	52,683 ↑	1,367 ↑
Sumatera Selatan	26,047 ↓	6,43 ↓	3,45 ↓	151,4 ↑	84,392 ↑	2,553 ↑
Riau	27,490 ↑	6,37 ↓	1,72 ↑	83,57 ↓	69,399 ↓	1,920 ↑
Kep. Riau	8,935 ↓	19,5 ↑	5,01 ↓	90,03 ↓	38,551 ↑	1,647 ↑
Jambi	15,757 ↓	2,35 ↓	4,85 ↑	115,74 ↓	40,051 ↓	1,319 ↑
Bengkulu	8,700 ↑	0,98 ↑	4,18 ↑	247,32 ↑	21,451 ↑	394 ↑

Kep. Bangka Belitung	5,329 ↓	0,71 ↓	3,9 ↓	131,93 ↓	12,628 ↓	516 ↑
Lampung	18,991 ↓	1,36 ↓	4,53 ↓	131,28 ↑	52,358 ↑	1,640 ↑

Keterangan :

↑ : Indikator Sistem Keuangan dan Perbankan mengalami peningkatan dari Q4-2019

↓ : Indikator Sistem Keuangan dan Perbankan mengalami penurunan dari Q4-2019

Provinsi di Pulau Sumatera memiliki kondisi keuangan dan perbankan antar provinsi berbeda-beda meskipun diperhadapkan pada gejala yang sama yakni Pandemi Covid 19. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku ekonomi masyarakat pada tiap-tiap daerah, struktur ekonomi, kondisi cadangan keuangan perbankan serta tingkat kemiskinan yang berbeda. Namun berdasarkan tabel diatas, seluruh Provinsi di Sumatera mengalami peningkatan *Non Performing Loan* (NPL). Kondisi ini menggambarkan bahwa *cashflow* perbankan tidak menunjukkan kondisi yang baik serta terjadi perlambatan pembayaran kredit dari masyarakat. Hal ini dapat terjadi akibat perilaku masyarakat di beberapa daerah memiliki keseragaman yakni melakukan pembiayaan di masa pandemi akibat perlambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid 19.

1.3 Motivasi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera dan kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan di Pulau Sumatera. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta rekomendasi kebijakan dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk melakukan pemulihan sistem keuangan yang terdampak Pandemi Covid 19. Penulis juga melakukan determinasi pada sistem keuangan Indonesia dan kaitannya dengan sektor moneter dan makroekonomi sebagai bagian dari peran dan tugas Bank Indonesia.

1.4 Research Gap

Penelitian ini memiliki limitasi pada sampel penelitian. Dalam penelitian ini identifikasi dan analisis masalah hanya ditujukan pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera dengan menggunakan periode dari kuartal 1 tahun 2008. Selain itu, penulis menganalisis korelasi kinerja sektor keuangan dan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi Rumah Tangga.

Novelti dalam penelitian ini dengan memasukan variabel baru untuk melihat korelasi adanya hubungan stabilitas sistem keuangan daerah dengan indikator makroekonomi daerah, menempatkan variabel Covid 19 sebagai variabel *shock* yang memberikan pengaruh terhadap indikator makroekonomi dan mengidentifikasi elastisitas pandemi Covid 19 dan indikator keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

1.5 Rumusan Masalah

Melalui penelitian ini, penulis hendak menganalisis indikator makroekonomi daerah yang ditandai dengan nilai PDRB terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia di tengah pandemi Covid 19 di tahun 2020. Indikator keuangan daerah dan kondisi perbankan serta gejolak ekonomi terkini memiliki pengaruh terhadap kinerja PDRB dalam jangka waktu pendek.

1.6 Tujuan dan Manfaat dari Penelitian ini:

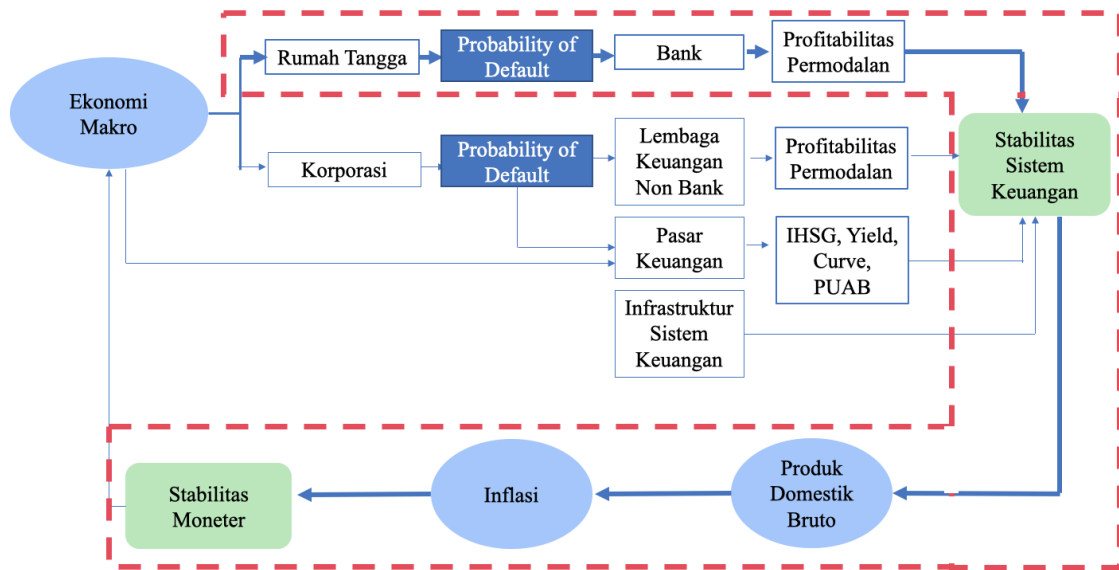
- a. Menganalisa faktor yang mempengaruhi PDRB setiap Provinsi di Wilayah Sumatera di tengah pandemi Covid 19;
- b. Mengetahui signifikansi pengaruh pandemi Covid 19 terhadap perekonomian daerah;
- c. Mengidentifikasi elastisitas indikator ekonomi dan keuangan terhadap perekonomian daerah;
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi Covid 19.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pertumbuhan Ekonomi dan Sistem Stabilitas Keuangan menjadi dua indikator ekonomi makro yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor keuangan dikatakan stabil bila instrumen keuangan dan lembaga yang terkandung didalamnya mampu berfungsi secara efektif dan efisien dan memiliki ketahanan terhadap gejolak ekonomi. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/11/PBI tahun 2014 menyatakan bahwa besarnya alokasi sumber pendanaan yang bersumber dari sistem keuangan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Sistem keuangan adalah sistem yang didalamnya terdapat lembaga, pasar, infrastruktur keuangan, serta pelaku ekonomi yakni rumah tangga dan korporasi.

Gambar 2.1 Hubungan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengendalian Moneter dilihat dari aspek Rumah Tangga



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Dalam penelitian ini, stabilitas sistem keuangan diukur dari sistem lembaga keuangan perbankan dengan pemusatan analisa terhadap pelaku ekonomi dari sektor rumah tangga. Analisa ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara perilaku rumah tangga, kondisi sistem keuangan perbankan memiliki korelasi yang erat kaitannya dengan pertumbuhan nasional ditengah pandemi Covid 19.

Selain dinamika gejolak ekonomi serta ketidakpastian pasar global membuat instabilitas pada pertumbuhan nasional, kerentanan sektor keuangan domestik juga memberikan dampak pada pelemahan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas sistem keuangan digambarkan pada saat fungsi lembaga keuangan bank dan non bank, fungsi pembayaran serta instrumen keuangan mampu menopang perekonomian nasional bila terjadi gejolak ekonomi. Sistem keuangan juga pada akhirnya diharapkan sebagai ujung tombak yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan penyediaan dana, pengalokasian sumber daya ekonomi dari waktu ke waktu, pengelolaan dana deposito guna mendukung dana investasi, serta memiliki kemampuan dan mengelola dan mengidentifikasi risiko-risiko keuangan. Sehingga dengan sistem keuangan yang stabil serta berjalan dengan seimbang maka akan mengidentifikasi dampak dan risiko keuangan yang terjadi dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dan efektif. Dalam Houben, Kakes dan Schiani (2004), ada tiga hal perlunya

menjaga kestabilan sistem keuangan dan hubungan dengan perekonomian nasional dalam kebijakan moneter:

- a. Sebagai bagian dari transmisi kebijakan moneter, stabilitas moneter hanya dapat terlaksana dengan adanya sistem keuangan yang stabil
- b. Semakin berkembangnya perekonomian maka akan menimbulkan risiko perekonomian nasional ditandai dengan perkembangan *financial deepening* yang bergerak dengan signifikan.
- c. Peningkatan transaksi antar pelaku usaha yakni industri dan pasar antar negara-negara menjadi pasar keuangan global yang semakin terintegrasi. Keterkaitan tersebut menjadikan antar negara memiliki kontektivitas ekonomi sehingga kegagalan pasar di luar negeri akan berdampak pada krisis ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan perilaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi saat ini. Ketidakstabilan perilaku ekonomi masyarakat akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Covid 19 bukan hanya menjadi persoalan pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Penerapan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid 19 mendorong terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hampir semua daerah di Indonesia mengalami perlambatan perekonomian dan kontraksi kinerja keuangan akibat penyebaran kasus Covid 19. Provinsi yang mengandalkan sektor jasa terutama sektor pariwisata, perhotelan dan restoran paling merasakan dampak dari pandemi tersebut. Selain itu, provinsi yang mengandalkan sektor pertanian turut mengalami kontraksi perekonomian misalnya saja Provinsi Lampung. Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 1,73% karena penurunan produktivitas sektor pertanian.

Sebagaimana teori makroekonomi, pendapatan nasional sangat erat kaitannya dengan kestabilan ekonomi dan aktivitas ekonomi suatu negara. Terhambatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut.

$$Y = f(K, L) \quad (1)$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan
 K : Kapital
 L : *Labor*

dimana K dan L adalah input yang dimiliki oleh manusia.

$$\text{Fungsi Konsumsi dan Tabungan : } Y = C + S \quad (2)$$

$$GDP = C + I + G + (X - M) \quad (3)$$

Keterangan :

GDP : *Gross Domestic Product* / Produk Domestik Bruto (PDB)

C : *Consumption*

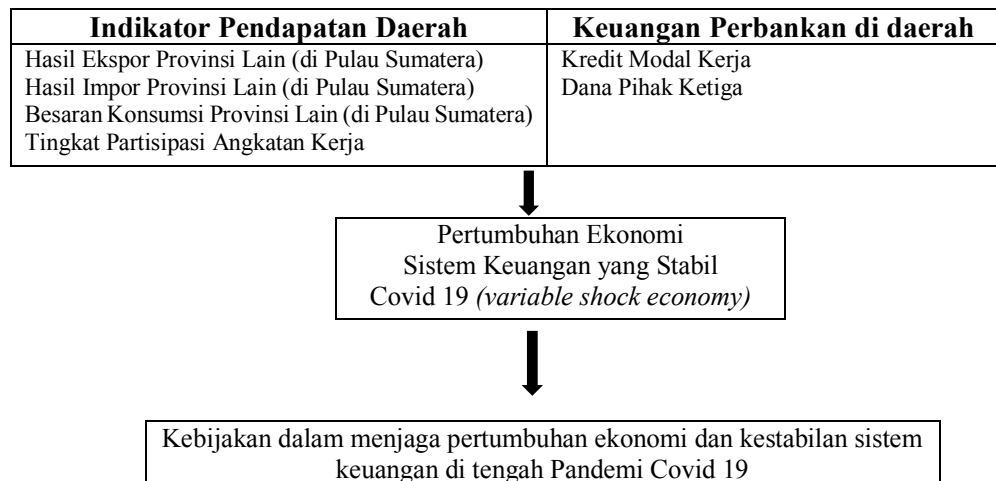
I : *Investment*

G : *Government*

(X-M) : *Export - Import*

S : *Saving*

2.2 Kerangka Konseptual



Penelitian ini menempatkan Covid 19 sebagai variabel independen sebagai gejala ekonomi (*shock economy*) untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi daerah dan sistem keuangan daerah. Melalui penelitian ini, *output* yang diharapkan adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem keuangan Indonesia serta kontribusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di masing-masing daerah dalam membantu tugas dan peran Bank Indonesia dalam mengelola perekonomian daerah.

2.3 Riset Terdahulu

Sebagai referensi dan justifikasi hasil penelitian, penulis menggunakan sumber penelitian lain sebagai bahan pendukung. (Burhanuddin, Makassar, Abdi, & Makassar, 2020) menyatakan bahwa Covid 19 menjadi bukti bahwa suatu virus yang menjadi permasalahan kesehatan mampu mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi

suatu negara bahkan pada cakupan global. Upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir penyebaran dampak serta dampak ekonomi lain perlu mempertimbangkan penyediaan dana cadangan untuk mempersiapkan ketidakstabilan ekonomi global yang bisa kapan saja terjadi dan tidak terprediksi.

Sedangkan dalam penelitian (Dentons HPRP, 2020) menyimpulkan bahwa Pemerintah dan Bank Sentral sebagai pihak regulator dituntut untuk melakukan koordinasi kebijakan pada skala global dan untuk menjaga kestabilan keuangan. Sedangkan kebijakan dalam negeri diperlukan panduan kebijakan untuk dapat menjadi acuan bagi lembaga terkait. Dalam penelitian ini juga diberikan rekomendasi bahwa pihak regulator harus memastikan kondisi keuangan mampu memenuhi kebutuhan layanan keuangan dalam publik dan keamanan keuangan secara digitalisasi. Temuan kajian lainnya mengungkapkan bahwa peningkatan kasus Covid 19 memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pasar keuangan di Bursa Shanghai dan juga saham New York Dow Jones (Sansa, 2020).

(Financial Stability Board, 2020) Financial Stability Board (FSB) dan G20 mendorong berbagai langkah untuk dapat mempertahankan pasokan dana kredit untuk sektor ekonomi riil, mendukung intermediasi keuangan dan cara memelihara ketahanan sistem keuangan global. Keputusan yang diambil dalam suatu negara yang menghadapi pandemi Covid 19 seharusnya mengambil langkah untuk menopang ketahanan keuangan yang memiliki titik kritis dan memberikan dukungan dana kredit kepada korporasi non keuangan. Bank Sentral juga telah melakukan serangkaian tindakan untuk mendorong likuiditas bank dan pasar keuangan. Federal Reserve AS juga telah mengaktifkan kembali fasilitas pendanaan *commercial paper* untuk fasilitas aliran dana ke korporasi. Sedangkan Bank of England meluncurkan skema pendanaan berjangka untuk mendukung pinjaman UKM dan pembiayaan korporat.

2.4 Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan PDRB dengan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lain

Sebagaimana landasan teori pertumbuhan nasional yang telah disampaikan pada Persamaan (1) dan (2), pertumbuhan ekonomi nasional merupakan komponen indikator makroekonomi berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan variabel independen indikator makroekonomi dari provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera untuk menghindari permasalahan regresi autokorelasi. Sedangkan untuk melihat keterkaitan ekonomi antar daerah dapat menggunakan variabel di daerah yang lain.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dimasukkan sebagai variabel independen untuk memenuhi fungsi penerimaan pada persamaan (1) yang terdiri dari modal dan tenaga kerja. TPAK juga berfungsi untuk melihat persentase penduduk dalam suatu wilayah yang masuk dalam usia kerja memiliki keaktifan secara ekonomi. Penyerapan tenaga kerja merupakan permasalahan yang muncul akibat pandemi Covid 19 ditandai dengan banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat pekerja informal di Indonesia yang terdampak pandemi tersebut.

H 1 : Terdapat korelasi positif antara aktivitas ekonomi suatu wilayah dengan indikator PDRB wilayah lain.

b. Hubungan PDRB dengan Indikator Sektor Keuangan

Kestabilan sistem keuangan dalam suatu wilayah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan nasional dipengaruhi oleh gejolak ekonomi baik yang berasal dari internal maupun eksternal dan membutuhkan sistem keuangan yang stabil. Stabilitas sistem dalam sektor keuangan menjadikan sistem keuangan memiliki ketahanan untuk memitigasi risiko sistemik yang disebabkan adanya guncangan ekonomi. Instabilitas keuangan menjadikan sektor keuangan tidak mampu menghadapi gejolak ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat krisis atau resesi terjadi. Sehingga dalam penelitian ini, hipotesa yang diambil untuk menggambarkan kondisi sistem keuangan terhadap PRDB, antara lain sebagai berikut:

H 2: Terdapat hubungan yang negatif antara Dana Pihak Ketiga terhadap pertumbuhan PDRB

H 3: Terdapat korelasi positif antara kredit yang digunakan untuk modal kerja dengan pertumbuhan PDRB

H 4: Terdapat hubungan yang positif antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan pertumbuhan PDRB

c. Hubungan PDRB dengan Pandemi Covid 19 sebagai *economy shock*

Implementasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat memberikan pengaruh pada pelemahan ekonomi. Kelesuan roda perekonomian yang diakibatkan dari perlambatan konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid 19 berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Data kasus terkonfirmasi positif Covid 19 pada tanggal 8 September 2020 telah mencapai 207.203 kasus. Angka ini terus meningkat disertai dengan perlambatan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hipotesa awal dalam penelitian ini terkait Covid 19 adalah:

H 5: Terdapat hubungan yang negatif antara kasus positif Covid 19 dengan pertumbuhan PDRB

III. METODOLOGI DAN DATA

Kajian ini menggunakan sampel data terbaru yang diambil dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional di sepuluh Provinsi di wilayah Pulau Sumatera. Data yang terkait dengan kondisi perbankan diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan data ketenagakerjaan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kajian ini telah memformulasikan beberapa variabel terkait dan telah dilakukan simulasi persamaan untuk menemukan variabel mana yang paling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam kajian ini. Dalam kajian ini data yang digunakan adalah data ekonomi dan keuangan pada Q1- 2008 sampai dengan Q2- 2020, sehingga total periode waktu yang digunakan adalah 46 kuartal.

Setiap variabel terlebih dahulu uji stasioneritas. Masing-masing variabel independen diidentifikasi apakah stasioner atau non stasioner. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non stasioner sehingga perlu dilakukan transformasi variabel dengan mengubah variabel tersebut menjadi bentuk *first difference*.

Secara matematis, persamaan regresi dalam kajian ini sebagai berikut :

$$dPDRB_t = \alpha_1 + \alpha_2 Eks\ Prov\ Lain_t + \alpha_3 dDPK + \alpha_4 dImp\ Prov\ Lain_t + \alpha_5 Kons\ Prov\ Lain_t + \alpha_6 dKred\ MK_t + \alpha_7 dTPAK_t + \alpha_8 Cov19_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

Keterangan :

PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Eks Prov Lain	: Jumlah Hasil Ekspor Daerah Lain
DPK	: Dana Pihak Ketiga
Imp Prov Lain	: Jumlah Hasil Impor Daerah lain
Kons Prov Lain	: Jumlah konsumsi Rumah Tangga daerah lain
Kred MK	: Kredit Modal Kerja
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Cov 19	: Covid 19
ε	: Kesalahan pengganggu

Metode dan tahapan Analisa dalam penelitian ini menggunakan uji *unit root* untuk menentukan variabel yang dianalisa memiliki sifat stasioner atau tidak dengan menggunakan *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Selanjutnya, penentuan variabel dilakukan dengan simulasi persamaan linear untuk mendapatkan variabel independent yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3.1 Hasil Simulasi Olah Data

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produk Domestik Regional Bruto	Non Stasioner										
Non Performing Loan	Non Stasioner										
Loan Deposit Ratio	Non Stasioner										
Dana Pihak Ketiga	Non Stasioner										
Ekspor Provinsi Lain	Non Stasioner										
Impor Provinsi Lain	Non Stasioner										
Konsumsi Provinsi Lain	Non Stasioner										
Inflasi	Stasioner	-0,406			-0,2823	0,6627	0,654	0,7176	-0,8089		
Kredit Rumah Tangga	Non Stasioner										
Kredit Investasi	Non Stasioner										
Kredit UMKM dan MKM	Non Stasioner										
TPAK	Non Stasioner										
BI 7 Days RR	Non Stasioner										
dDana Pihak Ketiga	Non Stasioner	0,588	0,1753	0,1701	0,5698	0,0085**	0,164		0,2747	0,0864	-0,0803**
dEkspor Provinsi Lain	Non Stasioner			0,062*	0,19	0,0392**	0,037**	0,0500**		0,4829	0,2641
dImpor Provinsi Lain	Non Stasioner			-0,9415				-0,949	0,6701	0,000***	0,000***
dKonsumsi Provinsi Lain	Non Stasioner									0,000***	-0,000***
dNon Performing Loan		-0,49	0,95						-0,3782	0,1675	
dBI 7 Days RR		0,6849									
dLoan Deposit Ratio		0,11	0,01***	0,0187**	0,4143	0,112	0,01*	0,918	0,0525		
dJumlah Kantor Cabang Bank		-0,67	-0,512	-0,000*		-0,11180	-0,000*				
dKredit Modal Kerja		0,11						0,168	-0,1946	0,0000***	0,000***
dKredit Investasi							0,3443	-0,675	0,6554	0,0003***	
dKredit UMKM dan MKM			0,000*	0,000*	-0,1373	0,167	0,0192*	0,0001*	0,0050*		
dTPAK											0,000***
Covid 19		-0,002***	-0,000*	-0,002*	-0,0004*	-0,0003*	0,0005*	-0,0003*	-0,0051*	0,001	-0,0042**
R-squared		45,30%	40,08%	34,89%	66,89%	50,08%	49,78%	52,18%	49,67%	72,78%	67,10%
Adjusted R-squared		44,90%	42,38%	35,78%	65,89%	51,23%	48,56%	51,89%	48,17%	69,68%	64,29%

Keterangan :

Tarf Signifikansi α

1 % :***

5 % :**

10%:

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Persamaan Regresi

Perhitungan persamaan menggunakan metode least squares dengan tujuan untuk melakukan analisis kondisi pada periode mendatang dengan basis data saat ini. Persamaan tersebut diolah dengan menghasilkan eviws dan sebelumnya setiap variabel dilakukan uji *Error Correction Model* (ECM). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel terpilih adalah stasioner atau non stasioner.

Dari tahapan tersebut maka Persamaan (3) diolah menjadi persamaan sebagai berikut:

$$dPDRB_t = 0,04 + 0,002 dEks Prov Lain_t - 0,05dDPK_t + 0,017dImp Prov Lain_t - 0,773 dKonsProvLain_t - 0,0006 dKred MK_t + 1,83dTPAK_t - 2,303 Cov19_t \quad (5)$$

Variabel	Koefisien	Prob	
C	0,029349	0,8910	R-squared : 0,670137
dEks Prov Lain	0,004271	0,2641	Adjusted R-squared : 0,642954
dDPK	-0,056154	0,0803*	Prob (F-statistic) : 0,000000
dImp Prov Lain	0,015099	0,0000***	Taraf Signifikansi α
dKons Prov Lain	-0,771537	0,0000***	1 % :***
dKred MK	-0,000102	0,0000***	5 % :**
dTPAK	1,986974	0,0000***	10%:*
Cov19	-2,303805	0,0042***	

Nilai R-squared dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi nilai variabel dependen dengan nilai kekuatan pengaruhnya sebesar 67%. Artinya, Ekspor provinsi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK), Impor provinsi lain, Konsumsi provinsi lain, Kredit Modal Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pandemi Covid 19 mampu mempengaruhi PDRB di Pulau Sumatera sebesar 67 persen sedangkan 33 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

4.1.1 Analisa Hipotesis 1

PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Konstan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dalam suatu periode dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Indikator PDRB yang digunakan dalam persamaan diatas terdiri dari Ekspor, Impor dan Konsumsi. Sesuai dengan persamaan (3) diatas :

$$GDP = C + I + G + (X - M)$$

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis keterkaitan komponen PDRB antar wilayah yang saling berkaitan. Penelitian ini menggunakan provinsi dalam satu area yang sama yakni di Pulau Sumatera. Hal ini membuat keterkaitan perekonomian antar daerah serta struktur sosial dan budayanya pun turut mempengaruhi. Selain itu

juga transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah menghitung transaksi yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut atau residen ditambah dengan masyarakat lain.

Pendapatan daerah dihasilkan dari adanya kegiatan produksi yang dilakukan oleh residen dan non residen, sehingga seringkali yang terjadi adalah faktor produksi dalam suatu wilayah daerah berasal dari daerah lain bahkan berasal dari luar negeri. Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa besarnya perdagangan internasional yakni ekspor dan impor daerah lain di wilayah Sumatera akan mempengaruhi PDRB wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan faktor produksi atau *input* yang digunakan untuk ekspor dan impor saling memiliki keterkaitan kebutuhan satu sama lain. Selain itu juga, meningkatnya konsumsi masyarakat dalam suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Sehingga H1 dapat di terima tolak H0, yang artinya indikator pertumbuhan ekonomi daerah lain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB suatu daerah.

4.1.2 Analisa Hipotesis 2

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh perbankan yang berasal dari masyarakat. DPK juga merupakan tabungan masyarakat yang dikelola oleh sektor perbankan. Merujuk pada persamaan (2) dimana :

Fungsi Konsumsi dan Tabungan Masyarakat : $Y = C + S$

Peningkatan DPK dalam bentuk tabungan akan mengurangi porsi konsumsi masyarakat bila tidak disertai dengan kenaikan pendapatan. Dalam perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran besaran konsumsi akan mempengaruhi besaran PDRB. Bila konsumsi meningkat maka PDRB akan meningkat pula.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan DPK yang merupakan simpanan masyarakat akan menurunkan besaran konsumsi dan menurunkan PDRB. Interpretasinya adalah H0 ditolak, H1 diterima yang artinya DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Interpretasi hasil diatas adalah kenaikan satu persen DPK akan mempengaruhi penurunan PDRB sebesar 0,005 persen.

4.1.3 Analisa Hipotesis 3

Peningkatan kredit modal kerja akan meningkatkan jumlah modal pengembangan lapangan kerja dan akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Adanya Pandemi Covid 19 ini sejumlah lapangan kerja harus terpukul dan mengurangi sejumlah tenaga kerja yang pada akhirnya

berimplikasi pada peningkatan jumlah pengangguran. Penyaluran kredit modal kerja juga termasuk didalamnya penyaluran kredit bagi UMKM dan MKM. Ditengah pandemi Covid 19 ini, sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi cukup parah padahal sektor UMKM telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyaluran kredit yang ditujukan bagi modal kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan (Financial Stability Board, 2020) yang mendorong agar lembaga keuangan terkait untuk mempertahankan pasokan dana kredit untuk sektor ekonomi riil. Sehingga peningkatan kredit modal kerja akan turut memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan daerah.

Dalam penelitian ini, hubungan kredit modal kerja terhadap pertumbuhan daerah memiliki pengaruh yang signifikan dengan korelasi negatif. H_0 ditolak H_1 diterima. Kredit modal kerja akan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi membutuhkan *lag time* untuk periode selanjutnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari peningkatan modal kerja tidak dapat dirasakan pada periode yang sama, butuh jeda waktu untuk mengubah kredit yang disalurkan untuk modal kerja menjadi output barang atau jasa dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1.4 Analisa Hipotesis 4

Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan tingkat tenaga kerja. Dijelaskan pada persamaan (1) bahwa fungsi pendapatan terdiri dari modal dan juga tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk yang masuk dalam usia kerja. Meningkatnya nilai TPAK mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja dalam kondisi yang besar serta tersedianya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, peningkatan indikator TPAK akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai penyumbang dari sektor tenaga kerja. Dari hasil penelitian diatas maka peningkatan TPAK di suatu provinsi sebesar satu persen akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 1,98 persen.

4.1.5 Analisa Hipotesis 5

Pada triwulan kedua tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di angka 5,32 persen (yoy) meskipun angka belum memasuki angka krisis ekonomi seperti ditahun 1997 dan 1998 namun kontraksi ini menjadi peringatan bahwa perlu dilakukannya sejumlah

langkah yang tepat sasaran dalam mengelola ekonomi ditengah pandemi Covid 19. Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini timbulnya pandemi Covid 19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sehingga artinya H_0 ditolak H_1 diterima. Interpretasi hasil tersebut adalah peningkatan satu persen jumlah kasus positif Covid 19 akan memberikan dampak pada penurunan PDRB sebesar 2,3 persen. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan (Burhanuddin et al., 2020) menyatakan bahwa Covid 19 menjadi bukti bahwa suatu virus yang menjadi permasalahan kesehatan mampu mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi suatu negara bahkan pada cakupan global.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Autokorelasi

Dalam Uji ini akan mendeteksi data yang digunakan dalam persamaan terjadi autokorelasi positif dan negatif atau tidak. Tujuan dari uji autokorelasi untuk mengidentifikasi ketergantungan masing-masing variabel independent memiliki korelasi atau tidak dengan menggunakan tabel Durbin Watson (DW) hitung. Penelitian ini akan menggunakan taraf signifikansi sebesar 1% (DW Tabel 0,01) dengan nilai DW tabel sebesar : 2,276545.

dL	1,33625
dU	1,71416
4-dU	2,28584
4-dL	2,66375

Karena $d > du$ dan $(4-d) > dU$ maka persamaan tersebut tidak memiliki autokorelasi positif dan negatif.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Tahapan ini menguji korelasi atau interkorelasi yang terjadi antar variabel independent dengan memperhatikan besaran nilai *Variance Inflation Factors* (VIF).

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,045570	1,138023	NA
dEks Prov Lain	1,440005	1,108407	1,108332
dDPK	0,001006	1,067373	1,066000
dImp Prov Lain	1,130005	3,531665	3,529768
dKons Prov Lain	0,014032	3,826779	3,823520
dKred MK	3,450001	1,399953	1,399751
dTPAK	0,179724	1,299457	1,296652
Cov19	0,462705	1,283896	1,141241

Penelitian ini menggunakan nilai tolerance sebesar 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan tabel diatas masing-masing variabel independen yang digunakan dalam persamaan ini memiliki nilai VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam persamaan ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian pada residual dalam persamaan (4) maka dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji ARCH. Dengan pengolahan melalui EViews maka diperoleh hasil Prob.Chi-Square $0,8213 > 0,01$ maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam persamaan ini.

F-Statistic	0,049926	Prob.F (1,87).	0,8237
Obs*R-squared	0,051045	Prob. Chi-Square(1)	0,8213

4.3 Elastisitas Indikator Ekonomi dan Keuangan Terhadap Perekonomian Daerah

Tabel 4.1 Hasil Olah Perhitungan Elastisitas Regresi

	PDRB	DPK	Cov19	Kons Prov Lain	Eks Prov Lain	Imp Prov Lain	Kredit MK	TPAK
Rerata	7,238	6,572	0,111	51,242	-17,32	-2,017	23,67	95
\bar{X} / \bar{Y}		0,902	0,015	7,035	-2,37	-0,276	3250,9	13,06
Koef		0,051	2,303	0,773	0,002	0,017	0,0006	1,83
SR		0,046	0,035	5,438	-0,004	-0,004	2,145	23,91
LR		0,048	-0,026	23,956	-0,004	-0,004	2,147	-28,81

Dari tabel diatas, angka SR menunjukkan elastisitas variabel dalam jangka pendek. Nilai $SR < 1$ menunjukkan bahwa variabel tersebut bersifat inelastis. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan nilai PDRB kurang responsif terhadap perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di perbankan serta aktivitas ekspor dan impor provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera. Jumlah DPK di bank memiliki pengaruh terhadap PDRB namun dalam jangka pendek kenaikan maupun penurunan DPK tidak langsung mempengaruhi tingkat PDRB di dalam suatu daerah. Kegiatan ekspor impor suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat PDRB di wilayah lain secara signifikan, namun dalam waktu pendek perubahan PDRB suatu wilayah kurang responsif terhadap aktivitas perdagangan dari wilayah lain. Sedangkan timbulnya pandemi Covid 19 bersifat inelastis terhadap PDRB, artinya pertumbuhan PDRB sangat responsif terhadap timbulnya Covid 19 dan dapat mempengaruhi PDRB dalam jangka pendek.

Sedangkan elastisitas dalam jangka panjang dapat dilihat dari angka $LR > 1$. Jika nilai LR lebih besar dari pada satu maka variabel tersebut bersifat elastis dalam jangka panjang. Konsumsi masyarakat mempengaruhi tingkat PDRB wilayah lain dalam jangka panjang sedangkan kredit modal kerja yang disalurkan perbankan kepada masyarakat untuk peningkatan lapangan kerja bersifat elastis terhadap peningkatan PDRB.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menggunakan *times series* yang cukup panjang (Tw 1 2008 – Tw 2 2020) untuk menunjukkan kondisi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia dari tahun ke tahun dalam situasi ekonomi yang berfluktuasi. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa *economy shock* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka pendek dan turut mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa gejala ekonomi berupa pandemi Covid 19 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB dan bersifat inelastis. Sejumlah langkah yang dilakukan untuk penanganan dan pemutusan rantai penularan Covid 19 mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Pulau Sumatera dengan sepuluh provinsi di dalamnya menjadikan keterikatan regional satu daerah dengan yang daerah menjadi erat, adanya kesamaan struktur ekonomi menjadikan daerah di wilayah ini saling berkoneksi. Aktivitas masyarakat dan sistem perdagangan suatu daerah akan mempengaruhi PDRB di wilayah lain yang dipengaruhi.

Rekomendasi Kebijakan :

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pulau Sumatera menjadi pulau kedua yang diandalkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa sekitar 5,02% secara spasial pertumbuhan ekonomi Indonesia masih disokong Pulau Jawa dan Sumatera. Tiga provinsi yang berkontribusi di wilayah Sumatera adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau dengan besaran kontribusi sebesar 21,32 persen. Sebagai wilayah penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperlukan langkah strategis dan tepat sasaran dalam rangka pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera dan juga nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dan diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan kebijakan dan langkah taktis, antara lain berupa:

- a. Pengawasan dan evaluasi sejumlah stimulus ekonomi yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu diperlukan koordinasi yang intens bersama dengan

pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk melakukan pengawasan secara berkala dan langsung serta melakukan evaluasi penyerapan anggaran stimulus perekonomian.

- b. Dari sisi fiskal, pemerintah daerah memberikan insentif bagi pajak daerah khususnya bagi sektor yang menjadi potensi daerah. Keringanan pajak daerah mampu mendorong pelaku usaha menggiatkan kembali usahanya misalnya saja insentif bagi pajak hotel, restoran, PBB pedesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan keringanan tarif transportasi udara maupun darat untuk mendorong sektor pariwisata pasca pandemi.
- c. Mendorong potensi sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk berkontribusi bagi pertumbuhan daerah dan mendorong sentra ekonomi yang cukup potensial di daerah. Sektor UMKM juga perlu didorong untuk beroperasi secara digitalisasi. Dengan pembatasan aktivitas masyarakat, *social distancing*/WFH maka platform digital menjadi media yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa melakukan kontak fisik. Digitalisasi UMKM memberikan peluang usaha kecil untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi Covid 19.
- d. Memberikan stimulus bagi aktivitas ekspor dan impor daerah, berupa kemudahan pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, keringanan pajak bea cukai serta kemudahan dalam pengurusan administrasi guna membuka keran ekspor untuk mendorong kinerja neraca perdagangan.
- e. Menjaga stabilitas inflasi nasional dan daerah terkhusus bagi pengendalian harga pangan pokok. Pandemi Covid 19 memberikan dampak pada penurunan daya beli dan munculnya inflasi dari sisi permintaan. Stabilitas harga bisa dilakukan dengan penyediaan kebutuhan pangan dan logistik yang memadai khususnya bagi daerah-daerah dengan tingkat penularan Covid yang tinggi. Kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat misalnya dengan ketersediaan cadangan beras di Bulog, daging serta sayuran. Pemerintah juga diharapkan memberikan kebijakan yang sesuai untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta melakukan pengawasan yang berkala dan melibatkan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.
- f. Selain itu juga, pemerintah serta Bank Indonesia turut memberikan pengawasan bagi stimulus bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. Hal ini juga dapat dilakukan dengan pemerintah daerah dari tingkat tertinggi sampai ke pemerintah wilayah seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), lurah dan kepala desa.

- g. Bank Indonesia mengoptimalkan kinerja TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dibantu dengan pihak terkait untuk mengawasi serta menjaga kondisi perekonomian daerah dan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat untuk meminimalisir gejala *economic behavior* masyarakat dan tidak melakukan *panic buying*.
 - h. Mengalokasikan anggaran daerah untuk pemulihan pandemi Covid 19 dengan penambahan anggaran bagi sektor kesehatan misalnya bantuan kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid 19, tenaga medis dan alat-alat kesehatan.
2. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
- a. Memberikan bantuan keringanan bagi debitur utamanya bagi pelaku usaha UMKM untuk mendorong usaha kecil dan menengah serta menjaga suku bunga kredit bagi para investor. Dikarenakan dengan peningkatan suku bunga akan berpengaruh pada peningkatan *capital outflow*.
 - b. Sektor perbankan membuka penyaluran kredit yang ditujukan sebagai modal kerja untuk meningkatkan serapan lapangan kerja.
 - c. Bank Indonesia juga diharapkan dapat menetapkan *lending facility* yang sesuai dan tepat guna untuk membantu likuiditas perbankan.
 - d. Melakukan evaluasi atau penilaian rencana kedepan bagi sektor keuangan dan moneter untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan.
 - e. Menjaga stabilitas sistem keuangan di sektor perbankan khususnya likuiditas dan solvabilitas perbankan terutama bagi bank yang memiliki dampak sistemik yang tinggi, menjamin dana pihak ketiga (DPK) dengan ketersediaan dana, serta memberikan stimulus restrukturisasi kredit.
 - f. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan pengawasan mekanisme pasar yang dinamis, peran pelaku eksportir dan investor serta menjaga kepercayaan pasar terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan Perppu No. 1 Tahun 2020 untuk memastikan bahwa sektor perbankan dan lembaga keuangan berjalan seturut dengan kebijakan yang ditentukan.
 - h. Memperkuat tim kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam mengawal dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kondisi sistem keuangan daerah.
3. Ketenagakerjaan

- a. Anggaran belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk proyek-proyek daerah yang berkaitan dengan infrastruktur yang padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah.
- b. Optimalisasi Balai Lembaga Kerja (BLK) di masing-masing daerah untuk memberikan program pelatihan kerja dan dunia usaha bagi masyarakat yang terdampak dan pekerja informal.
- c. Optimalisasi kartu prakerja dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak dengan melakukan pengawasan dan evaluasi ke tiap-tiap daerah. Langkah ini dapat dilakukan dengan ketersediaan data yang terbaru terkait data masyarakat miskin, menganggur, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan berkoordinasi dengan pimpinan daerah setempat dari bupati atau gubernur sampai kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, C. I., Makassar, U. M., Abdi, M. N., & Makassar, U. M. (2020). *AkMen*. (March). Financial Stability Board. (2020). *COVID-19 pandemic: Financial stability implications and policy measures taken*. (April), 1–14.
- Maryanti, S., Netrawati, I. O., & Faezal, F. (2019). Menggerakkan Perekonomian Melalui Pemulihan Usaha Dan Industri Mikro Kecil Menengah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2321. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.342>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212.
- Perencanaan, K., Nasional, P., Republik, B., Abstraksi, I., Baru, N., Pembangunan, R., ... Iv, V. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Sansa, N. A. (2020). The Impact of the COVID-19 on the Financial Markets: Evidence from China and USA. *SSRN Electronic Journal*, 19(April). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3567901>
- Suhartono, S. (2009). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (Ssk) Dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Jpsk). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 115996. <https://doi.org/10.26905/JKDP.V13I3.1098>
- Wahyudi, S. T., Nabella, R. S., & Badriyah, N. (2019). Analisis Pengaruh Siklus Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 87. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.2.87-95>
- Waldri, M., Harahap, E. F., Ekonomi, J., Ekonomi, P., & Bung, U. (n.d.). *Analisis struktur ekonomi dan sektor unggulan provinsi sumatera barat*. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>

LAMPIRAN

1) Hasil Olah Data

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.040670	0.200806	0.202532	0.8400
DEKSPOR_PROVLAIN	0.002501	0.003548	0.705018	0.4829
DIMPOR_PROVLAIN	0.017168	0.003157	5.437891	0.0000
DKONSUMSI_PROVLA	-0.773622	0.112187	-6.895836	0.0000
DKREDIT_MK	-0.000665	0.000140	-4.754144	0.0000
DKREDIT_INVESTASI	0.000964	0.000257	3.744172	0.0003
DDPK	-0.051167	0.029473	-1.736085	0.0864
DNPL	-0.001233	0.000885	-1.393060	0.1675
DTPAK	1.832291	0.394682	4.642445	0.0000
COV19	-2.303805	0.674102	-3.417593	0.0010
R-squared	0.727872	Mean dependent var	-0.322921	
Adjusted R-squared	0.696870	S.D. dependent var	3.194875	
S.E. of regression	1.759011	Akaike info criterion	4.072911	
Sum squared resid	244.4354	Schwarz criterion	4.352533	
Log likelihood	-171.2445	Hannan-Quinn criter.	4.185619	
F-statistic	23.47824	Durbin-Watson stat	2.149206	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.045570	1.138023	NA
DEKSPOR_PROVLAIN	1.44E-05	1.108407	1.108332
DDPK	0.001006	1.067373	1.066600
DIMPOR_PROVLAIN	1.13E-05	3.531665	3.529768
DKONSUMSI_PROV	0.014032	3.826779	3.823520
DKREDIT_MK	3.46E-10	1.399953	1.399751
DTPAK	0.179724	1.299457	1.296652
COV19	0.462705	1.283896	1.141241

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.049926	Prob. F(1,87)	0.8237
Obs*R-squared	0.051045	Prob. Chi-Square(1)	0.8213